

**SEJARAH PERKEMBANGAN
MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

**Oleh: Zaedun Na'im
STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang**

Abstract

The existence of Islamic education institutions in Indonesia is a reflection of the development of Islamic education, this is because through educational institutions how the implementation of Islamic education is designed and developed, but what is still a problem is from the aspect of management or management. This is due to the fact that many institutional management do not apply good management. Therefore this paper seeks to dig deeper into how the history of the management of Islamic educational institutions is, so that later it can become a foothold or reference in managing institutions in accordance with the characteristics of these institutions. In this study or discussion the writer uses qualitative research with a library research approach and this research is descriptive. The author will collect data in the form of references from books, journals or other sources and the next stage is an in-depth analysis to be able to produce a final conclusion. The results of the review of this article are that the history and dynamics related to the management of Islamic education institutions in this country are very diverse and have experienced ups and downs in their development, but in general in terms of management in Islamic education institutions there are still several weaknesses, such as human resources, facilities and infrastructure, financial management, and managerial governance
Keywords: history, management, Islamic educational institutions

Abstrak

Keberadaan Lembaga pendidikan Islam di Indonesia menjadi cerminan perkembangan pendidikan Islam, hal ini karena melalui lembaga pendidikan bagaimana penyelenggaraan pendidikan Islam di desain dan

Corresponding author: zaedunnaim82@gmail.com

EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam is licensed under

The CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

dikembangkan, akan tetapi yang masih menjadi permasalahan adalah dari aspek manajemen atau pengelolaannya. Hal ini disebabkan masih banyak dalam pengelolaan lembaga tidak menerapkan manajemen yang baik. Oleh karena itu tulisan ini berupaya menggali lebih dalam bagaimana sejarah perkembangan manajemen lembaga pendidikan Islam, sehingga nantinya bisa menjadi pijakan atau rujukan dalam pengelolaan lembaga yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Dalam telaah atau pembahasan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis akan mengumpulkan data-data berupa referensi dari buku, jurnal atau sumber lainnya dan tahap selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan akhir. Hasil dari telaah artikel ini bahwasanya sejarah dan dinamika yang berkaitan pengelolaan lembaga pendidikan Islam di negeri ini sangat beragam dan mengalami pasang surut perkembangannya, namun secara umum dalam kaitannya manajemen di lembaga Pendidikan Islam masih terdapat beberapa kelemahan, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan tata kelola manajerialnya
Kata kunci: sejarah, manajemen, lembaga pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Secara konseptual, pendidikan Islam sebagai agen pencerahan dan penyelamatan hidup manusia membutuhkan pondasi yang kuat, arah yang jelas dan tujuan yang utuh. Melalui pondasi, arah dan tujuan tersebut diharapkan idealitas pendidikan Islam sesuai yang tersirat dalam sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) senantiasa mendorong umatnya menjadi orang atau kelompok yang berkualitas, beriman, dan memiliki kesalehan yang tinggi¹

¹ Suprapti, "ANALISIS KRITIS MANAJEMEN MADRASAH DI ERA OTONOMI DAERAH," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 112.

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam, sekaligus aset pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya sesuai dengan sistem pendidikan nasional²

Hal itu tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan butuh kerja keras dan kerjasama dari semua pihak mengingat pendidikan Islam yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang tersebar di pelosok negeri ini memiliki karakteristik yang bermacam-macam, sehingga dalam hal ini dibutuhkan konsep dan arahan yang jelas mengenai bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam sehingga menjadikan lembaga pendidikan Islam ini maju dan lebih profesional

Perlu diakui bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam baik yang berbentuk pesantren, madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi-baik secara terpisah maupun bersama-sama dalam satu kompleks-masih jauh dari apa yang diharapkan umatnya. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap standar pendidikan. Apalagi, ketika disadari bahwa pendidikan merupakan faktor penentu bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan bangsa, membuat kelemahan yang ada pada pendidikan Islam semakin terasa sekali dan tentunya harus segera diselesaikan dan diatasi bersama-sama³

Lembaga atau institusi pendidikan ini memerankan peran yang sangat strategis sebagai wadah dalam mengembangkan pendidikan Islam. Disebut sebagai institusi atau lembaga pendidikan manakala terdapat beberapa ciri, yang menurut Noeng Muhadjir (1993:8) antara lain adalah adanya fungsi yang jelas dari lembaga tersebut, ada pelakunya, ada ciri fisiknya, dan ada ciri simboliknya⁴

² Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007).43

³ Qomar. 44

⁴ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, 1st ed. (Malang: Uin-Malang Press, 2008).hlm 201

Oleh karenanya dalam keberlangsungan lembaga pendidikan ini sangat dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar agar dapat berjalan sesuai dengan visi misi dari lembaga pendidikan tersebut. Dan oleh karenanya dalam tulisan ini akan mengkaji seperti apa sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam dari aspek manajemennya agar bisa diketahui runtutan sejarah dan dinamika dalam hal pelaksanaan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang fokus kajiannya di pesantren, madrasah dan perguruan tinggi. sehingga jika ditemukan kelebihan bisa dikembangkan untuk saat ini dan sebaliknya jika ternyata terdapat kelemahan-kelemahan pengelolaan Lembaga pada seblumnya bisa mencari solusi alternatif dalam memecahkan kelemahan tersebut.

Penulis mengambil tiga model dari lembaga pendidikan Islam tersebut, yakni madrasah, sekolah dan perguruan tinggi sebagai representatif lembaga pendidikan Islam yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini. Sehingga dalam hal ini temuan dalam tulisan ini sangat perlu dalam memberikan gambaran dan referensi bagi kita semua dalam merencanakan pengembangan Lembaga Pendidikan yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Dalam telaah atau pembahasan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis akan mengumpulkan data-data berupa referensi dari buku, jurnal atau sumber lainnya dan tahap selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan akhir

PEMBAHASAN

1. MADRASAH

a. Definisi

Kata "madrasah" dalam bahasa Arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" (zharaf makan) dari akar kata "darasa". Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Dari akar kata "darasa" juga bisa diturunkan kata "midras" yang mempunyai arti "buku yang

dipelajari" atau "tempat belajar"; kata "al-midras" juga diartikan sebagai "rumah untuk mempelajari kitab Taurat"⁵

Dalam prakteknya memang ada madrasah yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-'ulum al-diniyyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut madrasah diniyah. Kenyataan bahwa kata "madrasah" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "madrasah" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan"⁶

Seperti diungkapkan oleh Zuhairini, bahwa lembaga pendidikan Islam mulai bersemi di Indonesia sebelum kemerdekaan pada awal abad 20 Masehi dengan berdirinya madrasah islamiyah yang bersifat formal. Abasari dalam bukunya Samsul Nizar membagi sejarah dan perkembangan madrasah ke dalam dua periode:

1). Periode Sebelum Kemerdekaan⁷

Pada periode ini, Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian al Quran dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya mengalami suatu perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran (kurikulum), metode maupun struktur organisasinya, sehingga melahirkan bentuk baru yang disebut madrasah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik, dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi yang

⁵ Muhammad Madarik, "MANAJEMEN MADRASAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Cendekia* 2, no. 1 (2016): 130.

⁶ Madarik.131

⁷ Madarik. 132

bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, isi materi yang diajarkan di madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (surau dan pesantren) ditambah beberapa materi pelajaran yang disebut ilmu-ilmu umum.

Madrasah yang pertama di Indonesia, adalah madrasah adabiah di padang, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Nama resminya pada masa itu adalah *Adabiyah School*. Pada masa itu memang pengertian madrasah dan sekolah sama saja, tetapi penggunaan istilah madrasah nampaknya belum dikenal secara umum. Madrasah adabiah pada mulanya bercorak agama semata mata, tetapi kemudian pada tahun 1915 berubah coraknya menjadi H.I.S (*Holand Inland School*) Adabiyah. HIS Adabiyah merupakan sekolah pertama yang memasukan pelajaran agama kedalamnya. Kemudian pada tahun 1910 didirikanlah sebuah *Madrasah School* (Sekolah Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi *Diniyah School* (Madrasah Diniyah). Dan nama *Diniyah School* inilah, yang kemudian berkembang dan terkenal⁸

Di madrasah Adabiyah sendiri, materi pelajaran yang diajarkan bukan hanya materi agama. Tetapi di dalamnya juga diajarkan materi pelajaran umum, seperti matematika, sejarah, fisika, ilmu bumi, bahasa inggris dan sebagainya. Dengan mengajarkan materi pelajaran umum lainnya, Madrasah adabiyah secara tidak langsung dikelola dengan mengikuti perkembangan zaman⁹

Berkenaan dengan Madrasah diniyah, model lembaga pendidikan Islam ini berkembang hampir di seluruh Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren atau surau maupun berdiri di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri madrasah

⁸ Rini Setyaningsih, "Manajemen Madrasah Dalam Perspektif Sejarah," *Ijtem: Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan* 1, no. 2 (2018): 128.

⁹ Muh & Mu'alimin Hambali, *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).135

muhamadiyah yang kemudian diubah namanya Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan Pendidikan Islam yang di pelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan. Sementara itu pada tahun 1916 dilingkungan podok pesantren Tebuireng, Jombang telah didirikan madrasah shalafiyah, oleh K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 diadakan baharuan dengan memasukan pengetahuan umum¹⁰

2). Periode Sesudah Kemerdekaan¹¹

Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya, Departemen Agama sudah memayungi madrasah-madrasah, tetapi keberadaannya hanya sebatas pembinaan dan pengawasan saja.¹²

Dan kedudukan madrasah lebih diperjelas dengan diperkuat eksistensi madrasah dengan munculnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri P&K (Dikbud) dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975, yang berisi beberapa point penting, seperti dalam bab II pasal 2 disebutkan:¹³

- (a) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
- (b) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas
- (c) siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat

¹⁰ Setyaningsih, "Manajemen Madrasah Dalam Perspektif Sejarah."

¹¹ Madarik, "MANAJEMEN MADRASAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM." 133

¹² Madarik.134

¹³ Iskandar & Siti Zubaidah Engku, *Sejarah Pendidikan Islam*, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 130

Ini menunjukkan kedudukan Madrasah sudah disejajarkan dengan sekolah umum dan perkembangan Madrasah semakin meningkat jumlah Madrasah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia

b. Manajemen Madrasah

Dalam pembahasan manajemen madrasah ini penulis bagi dalam beberapa kategorisasi, yakni”:

- 1). Perkembangan manajemen madrasah awal kemerdekaan sampai orde baru

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh Negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah pada pasal 10 disebutkan” belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementrian Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum

Menurut Hasbullah Perubahan yang terjadi pada madrasah dimulai dengan dibukanya Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada awal tahun 50-an oleh Kementrian Agama di bawah Menteri Agama K.H Wahid Hasyim. Tujuan MWB ini diarahkan kepada pengembangan jiwa bangsa, yaitu pengembangan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan yaitu, perkembangan otak, perkembangan hati, dan perkembangan ketrampilan tangan.¹⁴

Lama belajar MWB ini 8 tahun dengan pertimbangan, bahwa pada umur 6 tahun anak sudah berhak sekolah, dan pada umur 15 tahun sesuai dengan undang-undang perburuhan, dimana pada umur tersebut anak telah diijinkan untuk mencari nafkah Disamping itu adanya MWB ini dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberikan

¹⁴ Setyaningsih, “Manajemen Madrasah Dalam Perspektif Sejarah.” 129

bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraanya, dalam upaya meningkatkan mutu madrasah Ibtidaiyah¹⁵

Namun kenyataanya MWB ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan diantara faktor penyebabnya adalah; 1) Keterbatasan sarana dan prasarana. 2) Ketidakmampuan pemerintah dalam mempersiapkan guru. 3) Kurang antusiasnya masyarakat dan penyelenggaraan madrasah. 4) Masyarakat menganggap dengan porsi 25% mata pelajaran Agama, maka MWB kurang memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan agama

Pada fase ini bisa disimpulkan pada aspek manajemen masih lemah dan yang lebih nampak adalah masalah fasilitas dan Sumber Daya Manusia

2) Perkembangan manajemen madrasah pada masa orde baru (1965-1997)

Sebagaiman telah disinggung sebelumnya SKB 3 Menteri juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Sementara itu madrasah mencangkup tiga tingkatan, yaitu:¹⁶

- a). Madrasah Ibtidaiyah, setingkat SD.
- b). Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP.
- c). Madrasah Aliyah setingkat SMA

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, maka pada tahun 1976 Departemen Agama menetapkan kurikulum setandar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik untuk MI, MTs maupun MA.¹⁷

¹⁵ Setyaningsih. ibid

¹⁶ Setyaningsih. 131

¹⁷ Setyaningsih. 132

Langkah-langkah strategis lainnya dalam rangka pengembangan madrasah menjadi sekolah umum dapat diwujudkan setelah diberlakukannya undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISPENAS)

Sehubungan dengan hal ini di atas dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 372 tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam (terdiri MI dan MTS) dan nomor 373 tahun 1993 tentang kurikulum madrasah Aliyah.¹⁸

Sewaktu Departemen Agama dipimpin oleh Menteri Agama Prof Munawir Sadjali, MA, terjadi pula pengembangan pada Madrasah Aliyah, yaitu dibukanya Madrasah Aliyah Program Khusus (PAPK). Pembukaan lembaga ini dalam rangka mengatasi kelangkaan ulama. Pembukaan MAPK ini tertuang dalam surat Menteri Agama No.371 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah keagamaan yang kurikulumnya dituangkan dalam keputusan Menteri Agama No 374 Tahun 1993¹⁹

Pada fase ini madrasah mengikuti kurikulum yang telah diatur oleh pemerintah yakni, dalam sebaran materi pelajaran agama 30 %, sehingga madrasah melakukan pengaturan dalam jadwal pelajaran yang tentunya berimbang pada pengurangan mata pelajaran muatan lokal yang menjadi ciri khas madrasah. Namun disamping itu adanya kemajuan dalam pengembangan model madrasah dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya yaitu Madrasah Aliyah Program Khusus (PAPK) yang mencetak ulama'.

3) Perkembangan manajemen madrasah masa reformasi (1997-sekarang)

Pada masa reformasi ini adanya Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan sebelum pemberlakuan UU Sisdiknas 2003, terjadi berbagai perubahan pada madrasah yaitu;

(1). Pengelolaan Daerah Kabupaten Kota

¹⁸ Setyaningsih.135

¹⁹ Setyaningsih. Ibid

Hal ini meliputi meliputi : operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, dan penyediaan anggaran.

(2). Pengelolaan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat terfokus pada beberapa hal:

- (a). Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta mengatur kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- (b). Penetapan materi standar pelajaran pokok.
- (c). Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
- (d). Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- (e). Penetapan persyaratan penerimaan perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar
- (f). Perubahan dalam aspek pemberdayaan madrasah, perubahan akan terlihat dalam pemberdayaan madrasah berupa : (1) pemberdayaan manajemen, meliputi pemberdayaan SDM pengelola pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, pengawas, dan lain sebagainya dan (2) siap memasuki era Manajemen Berbasis Sekolah.

Pada fase ini bentuk pengelolaan lembaga madrasah tidak sepenuhnya diatur oleh Pusat melainkan juga dari pihak Madrasah, sehingga bisa mengembangkan petensi yang ada dengan memperhatikan karakteristik Madrasah yang dikelola

Selanjutnya pada fase ini kedudukan atau keberadaan Madrasah lebih kuat secara undang-undang, karena Perkataan madrasah pada undang undang NO 20 tahun 2003 dapat ditemukan pada pasal 17 dan 18. Pada pasal 17: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidadiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.²⁰

Dari undang-undang Sisdiknas tersebut menunjukkan pengembangan model Madrasah sangat memberi keleluasaan dalam mendesain model apa yang diharapkan ketika mendirikan Madrasah yang tentunya menentukan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, seperti model madrasah yang concern mencetak generasi pada sisi akademisi atau menginginkan lulusan yang siap kerja ketika sudah lulus yang berupa kejuruan

Dan adanya era otonomi daerah saat ini yang berimplikasi pada perubahan politik pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, sebenarnya bagi dunia pendidikan madrasah tidak begitu masalah, karena secara struktur pengelolaan pendidikan madrasah lebih 85%-nya berstatus swasta, artinya hampir sebagian besar madrasah itu diselenggarakan oleh masyarakat Muslim, sehingga ketergantungan kepada pemerintah itu relative kecil. Bagi pendidikan Madrasah perubahan kebijakan pendidikan ini menjadi alasan kuat untuk “*back to basic*”, yaitu kembali ke khitah semula sebagai lembaga pendidikan masyarakat²¹

Salah satu yang menjadi problem utama madrasah adalah manajemen (pengelolaan) pendidikannya yang kurang bagus, kualitas tenaga pengajarnya yang kurang baik, dan kekurangan dana operasional sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dialami oleh dunia pendidikan Islam, termasuk madrasah adalah lemahnya manajerial, termasuk eksklusivitas, dan rendahnya prestasi. Praktik manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen *paternalistic*

²⁰ Setyaningsih.139

²¹ Etyk Widodo, Hendro. Nurhayati, *Manajemen Pendidikan*, 1st ed. (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020).229

atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Muncul ide-ide kreatif inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior²²

Sebagai pengaruh dari ide-ide pembaruan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah. Buku-buku pelajaran agama mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah, sebagai halnya buku-buku pengetahuan umum yang belaku di sekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian timbullah madrasah-madrasah yang mengikuti system perjenjangan dalam bentuk sekolah-sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah untuk tingkat menengah pertama dan adapula Kuliah Muallimin (pendidikan guru)²³

Dengan melihat perkembangan Madrasah yang semakin berkembang secara kuantitas namun belum melihat dari aspek konteks kualitas, tentunya peran besar dari pola pengelolaan atau manajemen dalam pengembangan madrasah.

Ditegaskan pula melalui catatan dari Ramaylis (2006:342) bahwa di antara persoalan yang dihadapi madrasah adalah: 1) kualitas guru yang belum memadai 2) terbatasnya sumber daya manusia dan dana 3) produktivitas lembaga yang kurang bermutu, 4) efesiensi pendidikan yang rendah, 5) relevansi pendidikan dengan dunia kerja, 6) manajemen pendidikan yang masih seragam, 7) proses pembelajaran yang kaku, 8) sarana dan

²² Widodo, Hendro. Nurhayati. 232

²³ Moh Arif, "MANAJEMEN MADRASAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM," *Episteme* 8, no. 2 (2013): 422

prasarana yang belum lengkap, 9) perpustakaan yang belum memadai, dan 10) kualitas input dan *out put* yang rendah²⁴

Sehingga dalam hal ini Mulyasa (2005) menyebutkan lima strategi pokok pengembangan madrasah kearah yang lebih baik:

- a) strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah
- b) strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di Madrasah
- c) strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di Madrasah
- 4) strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah
- 5) strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah

2. PESANTREN

Berikut ini penulis paparkan berkenaan pembahasan pesantren sebagaimana di bawah ini:

a. Definisi

Kata pesantren yang berasal dari kata santri dengan mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata tersebut mengandung arti asrama tempat tinggal santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Sumber yang lain menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa india chasti dari akar kata *sharta* yang berarti buku-buku-suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan²⁵

Kata pesantren sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata "pondok" menjadi "pondok pesantren". Ditinjau dari bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya karena kata pondok adalah berasal dari bahasa *funduq* yang artinya hotel dan pesantren. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya

²⁴ Suprpti, "ANALISIS KRITIS MANAJEMEN MADRASAH DI ERA OTONOMI DAERAH." 239

²⁵ Engku, *Sejarah Pendidikan Islam*. 172

suatu pendidikan agama islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Jadi pada hakikatnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam²⁶

Sebagaimana yang diungkapkan Sudjoko Prasojo (1984:6) bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang kyai mengajar ilmu agama islam kepada santri berdasar kitab-kitab yang di tulis dalam bahasa arab oleh para ulama-ulama arab oada abad pertengahan, para santri biasanya tinggal di pondok²⁷

Dan berdirinya pesantren diungkapkan oleh Fachry Ali (1987:67) pada mulanya adalah sebagai lembaga pendidikan umat Islam pedesaan yang berfungsi untuk konservasi tradisi keagamaan yang dijalankan oleh umat Islam tradisional. Pesantren diawal perkembangannya, sebagai lembaga pendidikan milik umat Islam yang keberadaannya *status quo*, karena orientasi misinya mempertahankan paham tradisionalisme islam, serta untuk mengurangi penetrasi gerakan modernisme Islam di pedesaan²⁸

Hal ini bisa dipahami keberadaan pesantren merupakan lembaga yang berdiri atas inisiatif sendiri, didukung penuh oleh masyarat, bersifat swadaya dan tidak ada tuntutan agar lembaga yang didirikan diakui oleh pemerintah

b. Manajemen pesantren

Kajian terhadap manajemen pendidikan Islam di pesantren sendiri dapat dilihat berdasarkan model pesantrennya sendiri yang secara umum model pesantren sebagai berikut:

- 1) Pesantren salaf atau pesantren tradisional²⁹

²⁶ Engku.ibid

²⁷ Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*.242

²⁸ Yasin.242

²⁹ Hambali, *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*.132

Aspek tradisionalitas dalam pesantren salaf ini tidak hanya menyangkut kelahirannya. Tetapi dalam aspek manajemennya juga dikatakan mengadopsi system manajerial tradisonal. System manajerial yang bersifat tradisional ini cenderung berjalan alami dan bahkan tanpa ada upaya melakukan pengelolaan secara efektif

Kepemimpinana biasanya cenderung terpusat di tangan kiai/pengasuh sehingga seluruh kebijakan mengenai pengelolaan pendidikan sepenuhnya ditentukan oleh kiai, seperti penentuan materi pelajaran, waktu pembelajaran, dan sebagainya

Dengan system manajerial yang sentralistik serta layaknya gerakan dakwah, maka manajemen pendidikan pesantren salaf ada yang menyebutnya dengan istilah manajemen serba “mono”, ‘mono-manajemen dan mono-administrasi’ dan sebagai tumpuan utamanya adalah figur kiai sebagai pengasuhnya

Oleh karena kebanyakan pesantren tradisional dikelola dengan berdasarkan tradisi, bukan profesionalisme berdasarkan keahlian (*skill*), baik human skill, *conceptual skill*, maupun technical skill secara terpadu dan tradisi ini merupakan salah satu kelemahan pesantren-meskipun dalam batas-batas tertentu dapat menumbuhkan kelebihan. Dalam perspektif manajerial, landasan tradisi dalam mengelola suatu lembaga, termasuk pesantren menyebabkan produk pengelolaan itu asal jadi, tidak memiliki fokus strategi yang terarah, dominasi personal terlalu besar, dan cenderung eksklusif dalam pengembangannya³⁰

Jika diamati keberadaan pesantren salaf walaupun secara pengelolaan itu belum terorganisir dengan baik namun secara keberlangsungan eksistensi pesantren bisa berjalan dengan baik karena tentunya didukung oleh masyarakat sekitar dan adanya bentuk pendanaan secara swadaya dari masyarakat sekitar dan tentunya juga kontribusi dari pengasuh itu sendiri.

2) Pesantren khalaf³¹

³⁰ Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*. 59

³¹ Hambali, *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*.134

Pesantren ini biasanya dicirikan dengan sifatnya yang terbuka terhadap perubahan. Di samping itu, pesantren khalaf atau modern sudah memiliki system dan manajemen pendidikan tersendiri sebagai respons terhadap tuntutan perkembangan zaman, sains dan teknologi

Pesantren khalaf dikelola dengan manajemen yang rapi dan sistematis sesuai dengan kaidah manajerial pada umumnya. Dengan demikian, pola kepemimpinan dalam pesantren khalaf ini pastinya juga tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi lebih kepada pola kepemimpinan yang demokratis³²

Keberadaan pesantren khalaf (modern) saat ini juga semakin berkembang dan banyak yang orangtua memondokkan putra/putri di pesantren khalaf ini karena menganggap model pesantren ini bisa memenuhi keinginan orangtua dan bisa mengikiti perkembangan zaman.

3) Campuran pesantren salaf dan khalaf

Selain dua model pesantren yang dijelaskan sebelumnya, ada juga model pesantren yang menggabungkan kedua model pesantren tersebut, yakni model pesantren semi salaf dan khalaf atau percampuran. Artinya percampuran disini, bahwa pesantren mengaku dan menanamkan diri pesantren salafiyah, namun juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang (modern)³³

Dan dalam pengelolaan lembaga lebih mengarah ke model khalaf yakni dengan manajerial yang baik namun tetap mempertahankan karakteristik atau kultur pesantren salaf

Dengan demikian secara garis besar manajemen pendidikan Islam di pesantren ditentukan oleh ciri dan karakteristik pesantren itu sendiri. Setiap pesantren dengan cirinya masing-masing akan banyak mempengaruhi seperti apa system manajerial pendidikan yang diterapkan di dalamnya. Harus diakui bahwa tidak mudah menerapkan prinsip manajemen pendidikan bagi semua lembaga

³² Hambali.134

³³ Kompri, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 39

pesantren yang ada di Indonesia ini. Sebab, sebuah ciri dan karakter suatu pesantren banyak diwarnai oleh visi-misi, motif dan juga kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya³⁴

Secara umum pesantren masih menghadapi kendala serius menyangkut ketersediaan sumber daya manusia profesional dan penerapan manajemen yang umumnya masih konvensional, misalnya tiadanya pemisahan yang jelas antara yayasan, pimpinan madrasah, guru dan staf administrasi, tidak adanya transparansi pengelolaan sumber-sumber keuangan, belum terdistribusinya pengelolaan pendidikan, dan banyaknya penyelenggaraan administrasi yang tidak sesuai aturan baku organisasi dan juga kiai masih merupakan figur sentral dan penentu kebijakan pendidikan pesantren³⁵

Hal tersebut menjadikan banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus bisa diatas oleh pemangku kebijakan pesantren dalam hal ini pengasuh yang berkaitan dengan sistem pengelolaan pesantren yang lebih baik dan ini bisa mengubah stigma negatif terhadap manajemen pesantren yang diasumsikan tidak ter *manage* dengan baik.

3. PERGURUAN TINGGI ISLAM

Berikut ini penulis uraikan sejarah dan bentuk pengelolaan perguruan tinggi Islam

a. Sejarah

Hasrat umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda. M. Natsir menulis dalam *Capita Selekta*, bahwa keinginan untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam itu telah muncul di hati umat Islam. M. Natsir menyebutkan, bahwa Dr. Satiman telah menulis artikel dalam *Pedoman Masyarakat* nomor 15 membentangkan cita-cita beliau yang mulia akan mendirikan satu sekolah tinggi Islam itu akan berpusat di tiga tempat, yakni Jakarta,

³⁴ Hambali, *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. 134

³⁵ Kompri, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. 67

Solo dan Surabaya. Di Jakarta akan diadakan sekolah tinggi sebagai bagian atas Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat *Westerch* (kebaratan). Di Solo akan diadakan sekolah tinggi untuk mendidik *mubalighin*. Di Surabaya akan diadakan sekolah tinggi yang akan menerima orang-orang pesantren. Kendatipun yang diungkapkan ini masih dalam bentuk ide, akan tetapi semangat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam itu telah muncul pada tahun 1930-an³⁶

Mahmud Yunus menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi yang pertama di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia, ialah *Sekolah Islam Tinggi*, didirikan oleh persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus. Sekolah Tinggi itu dibuka secara resmi pada tanggal 9 Desember tahun 1940, terdiri dari dua Fakultas yakni Fakultas Syariat (Agama) dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Sekolah Tinggi itu berjalan dengan lancar sampai tahun 1942. Tetapi sayang ketika Jepang masuk kota Padang (Maret 1942) dan memerintah Indonesia, maka Sekolah Islam Tinggi itu terpaksa ditutup, karena pemerintah Jepang hanya mengizinkan membuka sekolah/madrasah dari tingkat yang rendah saja. Dengan demikian berakhirlah riwayat Sekolah Islam Tinggi PGAI di Padang³⁷

Dan pada perkembangan perguruan tinggi Islam selanjutnya melalui Peraturan No. 34 Tahun 1950, fakultas agama Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta diubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Hal ini disebabkan cakupan pengetahuan agama Islam yang demikian luas tidak mencukupi untuk diajarkan dalam satu fakultas. Pada tahun 1960, PTAIN dengan ADIA (Akademi Dakwah Islam) Jakarta disatukan. Sejak tanggal 9 Mei 1960 namanya menjadi IAIN *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah* yang berada di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Jakarta³⁸

³⁶ Amiruddin, "DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA," *MIQOT* XII, no. 1 (2017): 102.

³⁷ Amiruddin.102

³⁸ Hasbi Indra, "PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DAN PERADABAN INDONESIA," *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016): 114

Muhaimin mengatakan, bahwa aspirasi umat Islam pada umumnya dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan. *Pertama*, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah. *Kedua*, untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. *Ketiga*, Untuk mereproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun sektor swasta, serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan dan sebagainya.³⁹

Dengan lahirnya Perguruan tinggi Islam yang sudah ada pada masa penjajahan ini menunjukkan adanya semangat yang luar biasa dari tokoh-tokoh akademis dalam mencetak generasi penerus bangsa ini dan menjadikan perguruan tinggi sebagai wadah lanjutan dari tingkatan pendidikan sebelumnya yakni tingkat SMA atau MA dan sederajat

b. Manajemen perguruan tinggi Islam dan polarisasi

Dalam uraian perguruan tinggi Islam atau yang lazim dengan nama perguruan tinggi agama Islam (PTAI) ini penulis kategorisasi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Dari segi aspek tanggung jawab pengelolaan, perguruan tinggi agama Islam (PTAI) terpolarisasi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) dan perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS)
- 2) Dari segi pendanaan PTAIN dikelola dan didanai hampir sepenuhnya oleh pemerintah/negara, sedangkan PTAIS dikelola dan didanai hampir sepenuhnya oleh masyarakat
- 3) Dari segi ruang lingkup program studi yang ditawarkan, PTAIN terpolarisasi menjadi sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN), institut agama islam negerian (IAIN), dan universitas islam negeri

³⁹ Amiruddin, "DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA." 103

⁴⁰ Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*.101

(UIN). Begitu pula PTAIS terpolarisasi menjadi sekolah tinggi, institut, atau universitas dengan menggunakan nama islam maupun tokoh muslim. Disamping itu, PTAIS sebenarnya juga mencakup ma'had aly (pesantren luhur atau pesantren setingkat perguruan tinggi)

Dari uraian diatas sudah bisa menggambarkan bagaimana bentuk pengelolaan lembaga perguruan tinggi Islam tersebut yang mana bisa ditarik benang merah adanya klasifikasi perguruan tinggi Islam memiliki 2 tipe, yakni negeri dan swasta. Sehingga dari sini bisa menggambarkan dari sisi finansial tentunya sudah barang tentu untuk perguruan tinggi Islam yang tipe negeri tidak ada kendala karena dapat dana dari pemerintah langsung, hal ini berbanding terbalik yang tipe swasta yang harus berjuang dalam hal pendanaan karena masih membutuhkan adanya swadaya dari masyarakat

Pada umumnya PTAIN lebih maju dibanding PTAIS selain sisi pendanaan yang memadai, juga manajemen lebih profesional, kontrol yang ketat, serta dukungan masyarakat yang lebih kuat dan luas

Namun secara khusus, dalam kasus-kasus tertentu, mungkin saja ada perguruan tinggi agama islam swasta yang lebih berkualitas dari pada perguruan tinggi agama islam negeri.⁴¹

Perkembangan mutakhir dalam pendidikan tinggi Islam adalah berubahnya STAIN/IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Pengembangan ini dilandasi perlunya integrasi keilmuan yang pernah menjadi diskursus masyarakat Islam di tanah air.⁴²

Capaian pengembangan yang dilakukan oleh STAIN/IAIN menjadi UIN menjadi gambaran bahwa dalam aspek manajerial lembaga mereka bisa dikatakan sudah baik dan profesional, karena tentunya tidak mudah berubah statusnya jika tidak didukung oleh manajerial yang profesional.

⁴¹ Qomar. 101

⁴² Indra, "PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DAN PERADABAN INDONESIA." 115

PENUTUP

Keberadaan lembaga pendidikan Islam sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda, sehingga lembaga ini memiliki potensi yang besar untuk dikelola menjadi lebih baik dan menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan di lembaga pendidikan agar bisa *manage* lembaga yang dipimpinnya bisa berjalan dengan efektif dan efisiensi,

Dengan melihat sejarah dan dinamika yang berkaitan pengelolaan lembaga pendidikan Islam di negeri ini sangat beragam dan mengalami pasang surut, namun kelemahan secara umum yang terdapat pada pengelolaan lembaga Pendidikan Islam antara lain, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan tata kelola manajerialnya

Dengan demikian, menjadi perhatian dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam dalam memberikan masukan dan dukungan moril kepada *stakeholder* untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan lembaga pendidikan yang dikelolanya agar Lembaga Pendidikan islam semakin maju dan bersaing di era globalisasi ini

REFERENSI

- Amiruddin. "DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA." *MIQOT* XII, no. 1 (2017): 98–117.
- Arif, Moh. "MANAJEMEN MADRASAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM." *Episteme* 8, no. 2 (2013): 415–38.
- Engku, Iskandar & Siti Zubaidah. *Sejarah Pendidikan Islam*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hambali, Muh & Mu'alimin. *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Indra, Hasbi. "PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DAN PERADABAN INDONESIA." *Al-Tahrir* 16, no. 1 (2016): 109–32.
- Kompri. *Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Madarik, Muhammad. "MANAJEMEN MADRASAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Cendekia* 2, no. 1 (2016): 123–47.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Setyaningsih, Rini. "Manajemen Madrasah Dalam Perspektif Sejarah." *Ijtem: Kajian Teori Dan Hasil Penelitian Pendidikan* 1, no. 2 (2018): 126–41.
- Suprpti. "ANALISIS KRITIS MANAJEMEN MADRASAH DI ERA OTONOMI DAERAH." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 102–23.
- Widodo, Hendro. Nurhayati, Etyk. *Manajemen Pendidikan*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Yasin, A. Fatah. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. 1st ed. Malang: Uin-Malang Press, 2008.